

Efektivitas Kebijakan Fiskal terhadap Permintaan Agregat dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Studi Literatur 2020-2024

Mutia Rafa Nursawitri[✉], Nadia Sulistyaningsih², Miranda Herdia Nova³, Miftahul Jannah⁴
Khanaya Isyabrina Maryam⁵, Gregorius Agug Steven⁶, Ahmad Setiawan Nuraya⁷

^{✉1234567}Manajemen, STIE Indonesia Banking School

Corresponding Author: Mutia Rafa Nursawitri, E-Mail: mutia.20231111097@ibs.ac.id

received: March 24, 2025 And Accepted For March 24, 2025

Published: March 27, 2025

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak kebijakan fiskal Indonesia terhadap permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi selama periode 2020-2024. Isu yang dibahas adalah bagaimana kebijakan fiskal, yang mencakup perpajakan dan pengeluaran pemerintah, dapat berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi setelah pandemi. Penelitian ini menggunakan metodologi yang dikenal sebagai tinjauan literatur, yang melibatkan pemeriksaan berbagai publikasi, laporan, dan data statistik yang terkait dengan pokok bahasan. Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif yang diberlakukan pemerintah Indonesia membantu meningkatkan permintaan agregat secara efektif, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sebagai hasil dari penemuan ini, muncullah diskusi mengenai pentingnya meningkatkan kolaborasi antara kebijakan fiskal dan moneter, serta meningkatkan efektivitas subsidi dan insentif untuk industri-industri penting. Dengan mempertimbangkan isu-isu yang sedang dihadapi ekonomi global, penelitian ini menyoroti pentingnya memiliki kebijakan fiskal yang efisien untuk mendorong pertumbuhan dan memastikan stabilitas ekonomi nasional.

Kata Kunci : Kebijakan Fiskal, Permintaan Agregat, Pertumbuhan Ekonomi, Indonesia, Studi Literature

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia sedang mengalami dinamika yang rumit, terutama dalam mengatasi masalah-masalah di era pasca pandemi COVID-19. Kebijakan fiskal, yang merupakan alat utama dalam manajemen ekonomi, diantisipasi untuk mengurangi dampak buruk pandemi dan menyelaraskan kembali pertumbuhan ekonomi ke arah yang sehat. Strategi ini berupaya memengaruhi permintaan agregat dengan memodifikasi pengeluaran pemerintah dan perpajakan, yang diantisipasi untuk meningkatkan konsumsi dan investasi domestik (Sari et al., 2024; Silalahi & Ginting, 2020). Pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat penting untuk dikaji, terutama

selama periode 2020-2024, ketika berbagai aspek ekonomi terganggu akibat pandemi dan beragam kebijakan pemulihan yang diberlakukan (Ma'ruf & Andriansyah, 2022).

Studi ini bertujuan untuk menguji dampak kebijakan fiskal terhadap lintasan permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode yang sangat penting ini. Studi ini berupaya menjelaskan peran kebijakan fiskal yang diimplementasikan dalam mendorong stabilitas makroekonomi, pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Feranika & Haryati, 2020; Edison & Andriansyah, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang lebih mendalam kepada para pembuat kebijakan dengan menganalisis fakta dan informasi yang relevan, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi inklusif di masa depan.

Kesenjangan penelitian merupakan konteks yang penting untuk dijelaskan dalam skenario ini. Meskipun banyak penelitian yang mengkaji hubungan antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, banyak penelitian yang tidak memberikan perspektif yang komprehensif tentang interaksi ini dalam konteks pasca epidemi COVID-19. Beberapa penelitian menekankan pada dampak desentralisasi fiskal, tetapi konsekuensi langsung dari kebijakan fiskal ekspansif yang diberlakukan selama krisis hanya mendapat sedikit perhatian (Nanga & Hudang, 2023; Syahidin & Syafi'i, 2022). Penelitian ini membahas kesenjangan ini dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap literatur saat ini untuk menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan fiskal dalam konteks spesifik Indonesia (Rusdiyantoro & Simanjuntak, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana pemerintah dapat merumuskan kebijakan fiskal yang lebih mudah beradaptasi dan responsif terhadap situasi ekonomi yang berfluktuasi, terutama dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh epidemi. Hal ini penting karena penelitian tentang kebijakan fiskal berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong keadilan sosial melalui pengurangan kesenjangan pendapatan dan dukungan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan (Syahidin & Syafi'i, 2022; Nadeak et al., 2022). Studi ini bertujuan untuk menyajikan perspektif yang tidak memihak mengenai hubungan antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi dengan menganalisis berbagai literatur dan statistik yang tersedia, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan untuk diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan baik di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Studi ini akan menganalisis dampak dari berbagai variabel kebijakan fiskal, termasuk pengeluaran pemerintah dan perpajakan, terhadap dinamika permintaan agregat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan unilateral antara kebijakan dan pertumbuhan dengan mempertimbangkan potensi saling ketergantungan. Fleksibilitas dalam penganggaran dan pengelolaan inflasi merupakan aspek penting dalam merumuskan dampak optimal dari kebijakan fiskal (Amri, 2020). Oleh karena itu, temuan-temuan dari studi ini diharapkan dapat meningkatkan

pemahaman mengenai seluk-beluk hubungan ini dan konsekuensi praktisnya untuk pengembangan kebijakan yang lebih efisien.

Pendahuluan ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang dan pentingnya penelitian yang akan dikaji dalam publikasi ini. Di tengah ketidakstabilan dan kerentanan ekonomi saat ini, pengembangan dan penilaian kebijakan fiskal yang komprehensif menjadi semakin penting. Proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi bukti empiris untuk menginformasikan pengembangan kebijakan di masa depan. Diharapkan bahwa kajian yang komprehensif terhadap literatur yang berkaitan dengan konteks Indonesia akan menghasilkan solusi yang inovatif dan praktis untuk meningkatkan perekonomian negara secara lebih berkelanjutan dan inklusif.

Landasan Literature dan Pengembangan Hipotesis

Tinjauan literatur ini memberikan landasan teoritis untuk penelitian mengenai hubungan antara kebijakan fiskal, permintaan agregat, dan pertumbuhan PDB di Indonesia. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan fiskal merupakan salah satu faktor terpenting dalam membentuk lingkungan makroekonomi suatu negara. Pengeluaran publik dan perubahan pajak adalah contoh instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi permintaan agregat dan, lebih jauh lagi, pertumbuhan ekonomi. Tinjauan Literatur tentang “Memahami Aliran Moneter dan Fiskal dalam Konsep Permintaan Uang di Indonesia: Sebuah Pendekatan Literatur” (2023) (Yakub et al., 2022). Penelitian telah menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, yang melibatkan keterlibatan pemerintah, dapat meningkatkan output ekonomi dan inflasi dalam keadaan tertentu (Paramita, 2021; Zahirah et al., 2023), sehingga memberikan kepercayaan pada strategi ini.

Zahirah et al. (2023) menemukan bahwa interaksi kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk memperkuat ketahanan fundamental ekonomi Indonesia ke depannya. Temuan ini relevan dengan kondisi khusus Indonesia. Stabilitas dan pertumbuhan dapat dicapai melalui kebijakan fiskal yang dinamis dan responsif terhadap kondisi ekonomi saat ini (Widiarsih et al., 2021). Penting untuk dicatat bahwa konteks dan tingkat utang dalam kaitannya dengan kemampuan pendapatan daerah sangat memengaruhi apakah utang publik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah atau tidak (Zend & Soetjipto, 2022).

Premis dari studi ini adalah bahwa “kebijakan fiskal yang responsif dan dinamis dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama pada periode pemulihan pasca pandemi,” dengan mempertimbangkan pentingnya dan ketepatan waktu dari dinamika tersebut. Selama periode penyesuaian pasca pandemi 2020-2024 (Lubis et al., 2024; Dzulkifli et al., 2023), data dan analisis akan digunakan untuk mengevaluasi hipotesis tersebut.

Karena adanya perbedaan dalam aplikasi dan hasil kebijakan fiskal yang diteliti dalam penelitian lain, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kekosongan pengetahuan dengan memeriksa

dampak kebijakan fiskal di Indonesia. Selain itu, dampak pengarah kebijakan fiskal terhadap pemulihan ekonomi masih kurang dibahas dalam literatur saat ini (Yakub et al., 2022; Santi & Iskandar, 2021), meskipun faktanya sangat penting.

Temuan dari studi ini dapat membantu menjelaskan potensi kebijakan fiskal sebagai alat manajemen ekonomi di Indonesia dan memberikan rekomendasi konkret tentang bagaimana pemerintah dapat membuat kebijakan fiskal yang bersifat jangka panjang dan inklusif (Zein et al., 2024; Arkan, 2024).

METODOLOGI

Untuk mengetahui bagaimana kebijakan fiskal memengaruhi pertumbuhan PDB dan permintaan agregat di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024, studi ini meninjau literatur yang relevan dan menggunakan analisis kualitatif. Untuk memahami interaksi yang rumit antara kebijakan fiskal, permintaan agregat, dan pertumbuhan ekonomi, metode ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki berbagai sudut pandang dan publikasi sebelumnya, menemukan celah dalam literatur saat ini, dan menarik kesimpulan.

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai institusi resmi dalam periode 2020-2024. Sumber data yang digunakan antara lain:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) – Kementerian Keuangan (Nota Keuangan dan RAPBN 2024)
2. Pendapatan Nasional Indonesia 2019-2023 – Badan Pusat Statistik (BPS)

Tempat dan Waktu Penelitian

Indonesia merupakan lokasi penelitian, dan data dikumpulkan dari situs resmi Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) dan Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id). Penelitian ini berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengkaji dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan PDB dan permintaan agregat di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024 adalah tujuan utama dari penelitian ini. Analisis ini menilai dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian Indonesia dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber resmi seperti Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil Uji Analisis

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Nasional

Pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi -2,07% pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020, menurut laporan Pendapatan Nasional Indonesia 2019-2023 dari BPS. Namun pada tahun 2021, ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan 3,69%, yang

meningkat menjadi 5,31% pada tahun 2022 dan 5,05% pada tahun 2023. Perkiraan untuk tahun 2024 menunjukkan peningkatan stabilitas ekonomi dengan perkiraan pertumbuhan berkisar di angka 5,03%.

Dari angka-angka ini, jelas terlihat bahwa perekonomian nasional dikelola dengan baik berkat kebijakan fiskal yang diterapkan selama ini. Kebangkitan ekonomi setelah pandemi bergantung pada beberapa hal, salah satunya adalah peningkatan belanja pemerintah dan insentif pajak.

Tabel dibawah ini adalah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia menurut Kementerian Keuangan



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan 2020-2023

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Dari Triwulan-I 2020 hingga Triwulan-II 2023, grafik ini menampilkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akibat pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 menyusut secara signifikan, dengan kuartal kedua mengalami penurunan paling tajam sebesar -5,3%. Tanda-tanda pertama pemulihan ekonomi muncul pada kuartal kedua 2021, ketika pertumbuhan mencapai 7,1%. Pada tahun 2022 dan 2023, pertumbuhan lebih konsisten, berada di kisaran 5%.

2. Kebijakan Fiskal dan Belanja Negara

Berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2024 dari Kementerian Keuangan, kebijakan fiskal selama 2020-2024 difokuskan pada pemulihan ekonomi dengan peningkatan belanja negara. Belanja negara dalam RAPBN 2024 diproyeksikan mencapai Rp3.304,1 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp1.074,1 triliun.

Strategi fiskal yang diterapkan mencakup:

- Peningkatan investasi infrastruktur untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
- Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan.
- Insentif pajak dan subsidi untuk mendukung sektor usaha dan daya beli masyarakat.

3. Realisasi Pendapatan Negara

Pendapatan negara mengalami peningkatan yang stabil selama periode penelitian. Pada tahun 2022, penerimaan dalam negeri mencapai Rp2.630,1 triliun. Sementara proyeksi pendapatan negara pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional.

4. Defisit Anggaran dan Pembiayaan

Defisit anggaran mengalami tren penurunan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, defisit mencapai Rp1.091,4 triliun atau 6,09% dari PDB. Namun, dengan kebijakan fiskal yang lebih terarah, defisit menurun menjadi Rp507,8 triliun atau 2,29% dari PDB pada 2024. Penurunan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal di tengah tantangan global.

5. Perbandingan Kinerja Ekonomi Triwulanan



Gambar 2. Pertumbuhan PDB Indonesia Triwulan 2020-2023 (y-on-y)

Sumber: www.bps.go.id

Gambar 2 menunjukkan bahwa ada perubahan besar dalam perkembangan ekonomi Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023, menurut data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Karena penurunan permintaan agregat di berbagai industri yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, ekonomi menyusut sebesar -5,32% pada kuartal kedua 2020. Meskipun tidak terlalu parah pada akhir tahun 2020, penyempitan ini masih berlanjut hingga saat itu.

Pertumbuhan ekonomi mencapai 7,08% (year-on-year/y-on-y) pada kuartal kedua tahun 2021, yang menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi seiring dengan peningkatan permintaan domestik dan stimulus fiskal pemerintah, yang menandai dimulainya tanda-tanda pemulihan. Pertumbuhan ekonomi tetap cukup stabil di kisaran 5% dari tahun 2022 hingga 2023, melanjutkan pola pemulihan ini.

Mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional-konsumsi rumah tangga dan investasi-telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan, yang berkontribusi pada stabilitas ini. Pentingnya permintaan agregat dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin didukung oleh data-data ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Permintaan Agregat terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Konteks Kebijakan Fiskal

Selama periode 2020-2024, permintaan agregat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif—melalui peningkatan belanja negara, insentif pajak, dan program stimulus ekonomi—berhasil mendorong permintaan agregat dan mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi.

Berdasarkan data dari BPS dan Kementerian Keuangan, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07% pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Untuk mengatasi dampaknya, pemerintah meningkatkan belanja negara hingga mencapai Rp2.750 triliun pada 2021 dan terus bertambah hingga Rp3.304,1 triliun pada 2024. Alokasi anggaran ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial guna meningkatkan daya beli masyarakat dan menarik investasi.

2. Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Peran Kebijakan Fiskal

Sebagai komponen utama permintaan agregat, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 55% terhadap PDB nasional. Analisis menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berupa subsidi energi, bantuan sosial, dan pengurangan pajak penghasilan berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan kartu sembako terbukti efektif dalam mempertahankan tingkat konsumsi, terutama dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi belanja perlindungan sosial pada 2023 mencapai Rp476 triliun, mencakup program jaminan sosial, subsidi energi, serta insentif pajak bagi rumah tangga. Kebijakan ini mampu meredam dampak pandemi dan memastikan konsumsi tetap stabil, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Investasi sebagai Komponen Permintaan Agregat dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Investasi memegang peranan kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan fiskal yang diterapkan selama 2020-2024 mencakup pemberian insentif pajak bagi pelaku usaha, pengurangan tarif Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), serta peningkatan belanja infrastruktur guna menarik investasi domestik dan asing.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada 2023, realisasi investasi infrastruktur mencapai Rp392 triliun, yang digunakan untuk pembangunan jalan tol, transportasi massal, dan pengembangan industri. Selain itu, kebijakan relaksasi pajak seperti penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor meningkatkan daya beli masyarakat dan industri otomotif, yang berdampak positif pada pertumbuhan industri manufaktur serta penciptaan lapangan kerja.

4. Peran Pengeluaran Pemerintah dalam Meningkatkan Permintaan Agregat

Selama periode penelitian, belanja pemerintah mengalami kenaikan signifikan dengan fokus utama pada pemulihan ekonomi pascapandemi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi belanja pemerintah pada 2024 terdiri dari:

- Belanja Pemerintah Pusat: Rp2.230,0 triliun
- Transfer ke Daerah dan Dana Desa: Rp1.074,1 triliun

Pengeluaran ini dialokasikan untuk sektor kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur strategis guna meningkatkan kapasitas produksi nasional dan daya saing Indonesia di tingkat global. Dampaknya terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5,03% pada 2024, mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong permintaan agregat.

5. Stabilitas Ekonomi, Inflasi, dan Defisit Anggaran dalam Kerangka Kebijakan Fiskal

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pada 2020, defisit anggaran mencapai Rp1.091,4 triliun atau 6,09% dari PDB akibat tingginya belanja stimulus ekonomi. Namun, dengan kebijakan fiskal yang lebih terkendali, defisit berhasil ditekan menjadi Rp507,8 triliun atau 2,29% dari PDB pada 2024.

Disiplin dalam kebijakan fiskal juga berkontribusi dalam pengendalian inflasi. Analisis menunjukkan bahwa inflasi selama 2022-2024 tetap berada dalam kisaran 3,5%-4,0%, yang mencerminkan efektivitas strategi fiskal dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat. Program subsidi energi dan pangan yang diterapkan pemerintah turut berperan dalam menstabilkan harga di tengah fluktuasi harga komoditas global.

6. Implikasi Kebijakan

Hasil analisis mengonfirmasi bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah selama 2020-2024 memainkan peran krusial dalam meningkatkan permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa kebijakan utama yang terbukti efektif meliputi:

- Peningkatan Belanja Negara – Alokasi anggaran yang lebih besar untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Insentif Pajak dan Perlindungan Sosial – Pengurangan pajak penghasilan serta subsidi sosial berhasil menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stabilitas konsumsi rumah tangga.
- Dukungan terhadap Investasi – Relaksasi pajak bagi investor serta peningkatan proyek infrastruktur mampu meningkatkan arus investasi domestik dan asing, yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.
- Pengelolaan Defisit Anggaran – Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan defisit anggaran dari 6,09% menjadi 2,29% dari PDB pada 2024 mencerminkan strategi fiskal yang

lebih disiplin dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal ekspansif yang diterapkan pemerintah Indonesia selama periode 2020-2024 memiliki dampak positif terhadap permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Ke depan, diperlukan strategi fiskal yang lebih adaptif untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi literatur dan analisis kualitatif terhadap berbagai data sekunder dari sumber terpercaya, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, serta laporan dari lembaga penelitian ekonomi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif yang diterapkan pemerintah selama periode 2020-2024 secara signifikan meningkatkan permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan belanja negara, baik melalui pembangunan infrastruktur, subsidi sosial, maupun insentif pajak, terbukti efektif dalam mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi. Konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen utama PDB tetap stabil berkat program bantuan sosial dan pengurangan pajak, yang menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi. Selain itu, investasi yang difasilitasi melalui insentif pajak dan pengembangan infrastruktur mengalami peningkatan yang berdampak positif terhadap pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja. Pengelolaan defisit anggaran yang lebih disiplin juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi, dengan tingkat defisit yang berhasil ditekan dari 6,09% terhadap PDB pada 2020 menjadi 2,29% pada 2024, serta inflasi yang terkendali dalam kisaran 3,5%-4,0%. Hasil ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun diperlukan strategi yang lebih adaptif dan berkelanjutan untuk memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang serta ketahanan terhadap dinamika ekonomi global.

Temuan dan Interpretasi

Menurut temuan studi ini, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang diimplementasikan seefektif mungkin. Permintaan agregat terbukti menguat dan pemulihan ekonomi pasca pandemi dipercepat melalui penerapan kebijakan fiskal ekspansif selama periode 2020-2024. Kebijakan ini terdiri dari pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi, insentif pajak, dan program stimulus ekonomi. Namun demikian, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kuantitas anggaran yang dialokasikan, tetapi juga bergantung pada efisiensi pemerintah dalam mengelola keuangannya. Pemeliharaan stabilitas ekonomi tetap menjadi hal yang sangat penting, terutama terkait dengan pengelolaan defisit anggaran dan pengendalian inflasi. Ada kemungkinan bahwa inisiatif-inisiatif yang pada awalnya dimaksudkan untuk menstimulasi pertumbuhan justru dapat menimbulkan bahaya jangka panjang bagi perekonomian negara jika elemen ini tidak dipertimbangkan.

Dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat, meningkatkan investasi, dan menjaga konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi, Kementerian Keuangan menekankan bahwa stimulus fiskal yang telah diberikan selama periode pemulihan ekonomi merupakan strategi utama yang digunakan. Komitmen pemerintah untuk membangun infrastruktur, memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan, serta memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi terlihat dari peningkatan belanja negara menjadi Rp3.304,1 triliun di tahun 2024. Di sisi lain, pengelolaan fiskal yang lebih ketat telah mendorong penurunan defisit anggaran dari 6,09% PDB pada tahun 2020 menjadi 2,29% PDB pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan kebijakan fiskal.

Selain itu, temuan studi ini menekankan pentingnya hubungan yang sinergis antara kebijakan moneter dan fiskal dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi. Penting untuk memastikan adanya koordinasi yang erat antara kebijakan suku bunga, pengelolaan likuiditas, dan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Meskipun pengeluaran publik yang lebih besar dapat membantu pertumbuhan ekonomi, hal ini juga dapat menimbulkan tekanan inflasi dan ketidakseimbangan anggaran jika tidak direncanakan secara efektif. Hal ini berdasarkan data yang berasal dari berbagai sumber (termasuk lembaga-lembaga pemerintah). Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pengeluaran yang lebih strategis dan terencana untuk meminimalkan dampak buruk, seperti penurunan daya beli akibat inflasi.

Dengan mempertimbangkan implikasi dari temuan ini, penelitian ini menyarankan agar pengembangan kebijakan fiskal dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang lebih integratif, sesuai dengan kebijakan moneter yang saat ini berlaku. Untuk memastikan alokasi sumber daya fiskal dilakukan dengan cara yang transparan dan efisien, serta mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang dan stabilitas makroekonomi, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Fokus kebijakan tidak hanya pada mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperkuat infrastruktur produktif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengembangkan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi. Kebijakan fiskal Indonesia memiliki potensi untuk terus menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia, asalkan direncanakan dan diimplementasikan dengan baik.

KESIMPULAN

Analisis ini menyoroti fakta bahwa kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh pemerintah Indonesia selama periode 2020-2024 memainkan peran yang sangat krusial dalam mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Berkat penerapan kebijakan fiskal ekspansif yang mencakup peningkatan belanja negara, pemberian insentif perpajakan, dan pelaksanaan program perlindungan sosial, perekonomian Indonesia mampu keluar dari fase kontraksi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan kembali ke jalur pertumbuhan yang lebih stabil. Peningkatan daya beli masyarakat,

akselerasi investasi, dan penguatan konsumsi rumah tangga, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional, merupakan kemampuan yang telah terbukti dapat dicapai melalui implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.

Di sisi lain, keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan anggaran tersebut. Stabilitas ekonomi harus terus menjadi perhatian utama, terutama dalam hal menjaga keseimbangan antara ekspansi anggaran dan pengendalian inflasi. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat nilai tukar, dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kondusif untuk investasi dan pengembangan lapangan kerja. Hal ini dapat dicapai dengan koordinasi yang erat antara pengelolaan anggaran fiskal dan kebijakan mengenai suku bunga.

Sebagai tambahan, penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih strategis dan berfokus pada jangka panjang. Agar kebijakan fiskal tidak hanya memberikan pengaruh terhadap pemulihan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga mampu membangun pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan, maka kesinambungan anggaran dan efisiensi program stimulus harus menjadi fokus prioritas. Dengan memastikan bahwa alokasi anggaran diarahkan pada bidang-bidang yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta pengembangan teknologi dan industri strategis, pemerintah perlu memaksimalkan efek pengganda dari belanja publik untuk memaksimalkan efektivitas belanja publik.

Studi ini menyarankan agar kebijakan fiskal ke depan lebih dapat beradaptasi dengan dinamika perekonomian global dan memperhatikan unsur kesinambungan fiskal guna mencegah risiko ketidakseimbangan anggaran di masa mendatang. Rekomendasi ini merupakan implikasi dari kesimpulan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini. Selain itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk melihat dampak jangka panjang dari kebijakan fiskal yang telah dijalankan, khususnya terkait dengan peningkatan daya saing perekonomian Indonesia di tingkat dunia. Dengan strategi yang lebih terintegrasi, disiplin fiskal yang lebih baik, dan koordinasi kebijakan yang efisien, kebijakan fiskal Indonesia memiliki potensi untuk terus menjadi instrumen utama dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, E. H., Maulana, J., Fitrawaty, F., Simanjuntak, Y., & Siahaan, T. E. G. (2024). Pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia: pendekatan kurva IS. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 746-755.
- Wafi, I. (2020). Peranan Good Corporate Governance dalam Perbankan Syariah. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), 183-194
- Widiarsih, D., Darwin, R., & Murdy, K. (2021). Efektivitas fiskal - moneter: strategi pemulihan ekonomi provinsi riau dalam menghadapi era new normal. *Jurnal Inovasi Pendidikan*

Ekonomi (JIPE), 11(1), 67.

- Abdillah, F. (2024). Dampak ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 2(1), 27-35.
- Abdullah, H. (2014). Realokasi kebijakan fiskal: implikasi peningkatan human capital dan pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Bina Praja*, 06(02), 117-128. .
- Amri, K. (2020). Kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah: bukti data panel di indonesia. . *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 8(1), 1-18.
- Amri. (2020). Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Bukti Data Panel di Indonesia. *Al-masharif jurnal ilmu ekonomi dan keislaman* .
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Ekonomi Indonesia 2019 Tumbuh 5,02 Persen*. Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Neraca Rumah Tangga Indonesia 2020-2022*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2021-2022 Buku 2 (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua)*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Produk Domestik Bruto Indonesia Trivulanan 2020-2024*. Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Neraca Rumah Tangga Indonesia 2023-2024*. Badan Pusat Statistik.
- Handoko, D. O., Putra, P. A., Ismail, R., & Soemitra, A. (2023). Bauran kebijakan fiskal dan moneter terhadap perekonomian dalam perspektif syariah. . *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 12-20. .
- Hanifa, N. and Fisabilillah, L. W. P. (2021). Peran dan kebijakan pemerintah indonesia di masa pandemi covid-19. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 9-19.
- Harahap, E. F., Luviana, L., & Huda, N. (2020). Tinjauan defisit fiskal, ekspor, impor dan jumlah umkm terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 151.
- Jamil, H. (2020). Implikasi kebijakan fiskal era orde baru dan era reformasi dalam mewujudkan pertumbuhan inklusif di indonesia.
- Kementerian Keuangan . (2021). *RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN : 2021*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2022). *RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN : 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2023). *RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN : 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2024). *Buku II Nota Keuangan RAPBN TA 2024*. Indonesia: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2024). *RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN : 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- M. Yakub et al. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. *Kinerja*, vol. 19, no. 1, pp. 10789-10800, 2022.
- Ma'ruf, M. R. and Andriansyah, E. H. (2022). Kebijakan fiskal dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi indonesia di masa pandemi. . *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 10(3), 346-356.
- Masnawaty, S., Sahade, S., & Rijal, S. (2023). Analysis of the effectiveness of fiscal policy in driving the regional economy: case study in south sulawesi province, indonesia. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(2), 1295-1302.
- Prasasti, S. R. (2023). Does fiscal policy matter? a study on economic crises in indonesia. *Jejak*, 16(1).

- Saragih, H. S. (2022). Pengaruh perdagangan internasional dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia. *Journal of Social Research*, 1(5), 377-383.
- Sari et al. (2024). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia.
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. . (2024). Kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap perekonomian indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(4), 1-10.
- Sugandi, E. A. (Asia-Pacific Financial Markets, 29(3), 411-447.). 2021. *Indonesia's financial markets and monetary policy dynamics amid the covid-19 pandemic*.
- Surjaningsih, N., Utari, G. A. D., & Trisnanto, B. (2012). Dampak kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 14(4), 389-420.
- Sutawijaya, A. and Lestari, E. P. . (2013). Penerapan metode vector auto regression dalam interaksi kebijakan fiskal dan moneter di indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 14(1), 66. .
- Wijayanti, D. and Aji, M. R. B. (2023). Analisis kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 20(1), 379-389. .

Author Information:

Mutia Rafa Nursawitri

Email: mutia.20231111097@ibs.ac.id STIE Indonesia Banking School Indonesia